

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK
UNTUK PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI
Program Studi Manajemen – Strata 1**

**Nama : Rachmat Awaludin
NIM : 43107110055**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat Awaludin

NIM : 43107110055

Program Studi : Manajemen

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Agustus 2009

Rachmat Awaludin
NIM: 43107110055

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rachmat Awaludin
NIM : 43107110055
Program studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok untuk
Penundaan Pembayaran Cukai
Tanggal Lulus Ujian : 28 Agustus 2009

Disahkan oleh:
Pembimbing Skripsi

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
(Tri Wahyono, SE., MM)

Dekan

Ketua Program Studi Manajemen – S1

(Dra. Yuli Harwani, R., MM)

(Arief Bowo Prayota K, SE., MM)

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi
Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok untuk
Penundaan Pembayaran Cukai

Dipersiapkan dan Disusun oleh:
Rachmat Awaludin
43107110055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Agustus 2009

Susunan Dewan Penguji
Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
(Tri Wahyono, SE., MM)
Anggota Dewan Penguji

(Arief Bowo Prayota K, SE., MM)

Anggota Dewan Penguji

(Dra. Aty Herawati, M.Si)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok untuk Penundaan Pembayaran Cukai “ diajukan untuk memenuhi sebagian syarat dinyatakan lulus dari Universitas Mercu Buana.

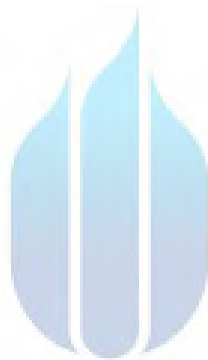
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Yuli Harwani, R., MM selaku Dekan Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Arief Bowo Prayota K, SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Universitas Mercu Buana,
3. Bapak Tri Wahyono, SE., MM selaku dosen pembimbing materi skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Bapak Sudaryanto selaku Kepala Sub Direktorat Pita Cukai DJBC.
5. Bapak-bapak Kepala Seksi Sub Direktorat Pita Cukai DJBC.
6. Rekan-rekan Pegawai Sub Direktorat Pita Cukai DJBC.
7. Orang tua beserta kakak adik yang telah memberikan bantuan baik berupa materi dan semangat serta do'anya dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendorong motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam menyusun skripsi ini.

Penulis senantiasa menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan Rokok, Pembaca, dan penulis sendiri.



Jakarta, Agustus 2009

Rachmat Awaludin

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Manajemen Keuangan	7
1. Pengertian Manajemen Keuangan	7
2. Fungsi Manajemen Keuangan	8
B. Laporan Keuangan	9
1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan	9
2. Komponen Laporan Keuangan	11
3. Analisa Laporan Keuangan	13

C. Rasio Keuangan	13
1. Pengertian Rasio Keuangan	13
2. Analisis Rasio Keuangan	14
3. Keunggulan Analisa Rasio	19
4. Keterbatasan Analisa Rasio	20
D. Penundaan Pembayaran Cukai	21
1. Pengertian Penundaan Pembayaran Cukai	21
2. Ketentuan Penundaan Pembayaran Cukai	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum	29
B. Metode Penelitian	31
C. Sampel Penelitian	32
D. Variabel dan Skala Pengukuran	32
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
A. Batasan Kinerja Keuangan untuk Penundaan Pembayaran Cukai	37
B. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok Dalam Berbagai Ukuran Penilaian Rasio	40
C. Nilai Cukai yang Dapat Diberikan Penundaan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Rasio Lancar PT. Gudang Garam Tbk	41
Tabel 4.2 Rasio Cepat PT. Gudang Garam Tbk	42
Tabel 4.3 <i>Asset to Total Debt Ratio</i> PT. Gudang Garam Tbk	43
Tabel 4.4 <i>Total debt to equity ratio</i> PT. Gudang Garam Tbk	44
Tabel 4.5 <i>Profit Margin Ratio</i> PT. Gudang Garam Tbk	45
Tabel 4.6 <i>Return On Equity</i> PT. Gudang Garam Tbk	46
Tabel 4.7 Rasio Lancar PT. BAT Indonesia Tbk	47
Tabel 4.8 Rasio Cepat PT. BAT Indonesia Tbk	47
Tabel 4.9 <i>Asset to Total Debt Ratio</i> PT. BAT Indonesia Tbk	48
Tabel 4.10 <i>Total debt to equity ratio</i> PT. BAT Indonesia Tbk	49
Tabel 4.11 <i>Profit Margin Ratio</i> PT. BAT Indonesia Tbk	50
Tabel 4.12 <i>Return On Equity</i> PT. BAT Indonesia Tbk	50
Tabel 4.13 Hasil Analisis Rasio Keuangan	51
Tabel 4.14 Daftar pemesanan pita cukai PT. Gudang Garam Tbk	53
Tabel 4.15 Daftar pemesanan pita cukai PT. BAT Indonesia Tbk	55

ABSTRAK

Penundaan pembayaran cukai merupakan penangguhan pembayaran cukai yang diberikan kepada perusahaan rokok, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam melakukan pembayaran. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai adalah perusahaan rokok memiliki kinerja keuangan yang baik.

Skripsi ini membahas bagaimana batasan kinerja keuangan perusahaan rokok untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai, bagaimana kinerja keuangan perusahaan rokok dan seberapa besar nilai cukai yang dapat diberikan penundaan. Sampel yang dilakukan pada penelitian ini hanya terbatas pada 2 (dua) perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Gudang Garam Tbk dan PT. British American Tobacco Indonesia Tbk. Data diperoleh dari Direktorat Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan rokok guna menghitung nilai cukai yang dapat diberikan penundaan.

Batasan kinerja keuangan yang dihitung dari laporan keuangan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai tergantung pada jenis jaminan yang akan dipergunakan oleh perusahaan rokok. Kinerja keuangan perusahaan yang dimaksud berupa likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas / profitabilitas.

PT. Gudang Garam Tbk dan PT. British American Tobacco Indonesia Tbk memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, namun untuk untuk rasio rentabilitas / profitabilitas PT. British American Tobacco Indonesia Tbk menghasilkan angka yang negatif, hal ini disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Kedua

perusahaan tetap masuk dalam persyaratan kinerja keuangan yang baik untuk penundaan pembayaran cukai. Untuk PT. British American Tobacco Indonesia Tbk tidak dapat diberikan tambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan karena memiliki rentabilitas / profitabilitas negatif.

Untuk mengajukan nilai cukai yang akan dimintakan penundaan pembayarannya, disarankan perusahaan rokok harus menyiapkan kinerja keuangan yang baik. Batasan kinerja keuangan yang baik perlu dinaikkan untuk menjamin pelunasan cukai yang diberikan penundaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan Agustus 2007 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Latar belakang perubahan tersebut untuk mengakomodir hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

barang-barang sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 39 tahun 2007 dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No. 39 tahun 2007 yang terdiri dari :

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Cara pelunasan cukai sebagaimana tertulis dalam pasal 7 ayat 3 UU No. 39 tahun 2007 dilaksanakan dengan:

- a. Pembayaran; pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan.
- b. Pelekatan pita cukai; pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya; pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: barcode dan hologram.

Rokok sebagai salah satu barang kena cukai cara pelunasan cukai dilakukan dengan pelekatan pita cukai. Perusahaan rokok untuk dapat menjual produknya haruslah melekatkan pita cukai pada kemasan rokok sebelum keluar dari pabrik. Untuk mendapatkan pita cukai perusahaan rokok terlebih dahulu mengajukan dokumen permohonan penyediaan pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Setelah pita cukai tersedia barulah perusahaan rokok mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen Ck-1 untuk mengambil pita cukai yang telah diajukan permohonan penyediaan terlebih dahulu.

Pemesanan pita cukai melalui dokumen Ck-1 dapat dilakukan secara tunai atau kredit, tunai berarti nilai cukai yang menjadi kewajiban langsung dibayar melalui bank presepsi, sedangkan kredit merupakan penundaan pembayaran cukai sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 2007 pasal 7A.

Penundaan pembayaran cukai merupakan salah satu peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan yang diberikan pemerintah untuk memberi kemudahan pembayaran kepada perusahaan rokok dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Disini terlihat dua kepentingan yang dihadapi pemerintah yaitu penerimaan negara dan pengendalian atas barang yang berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Terlepas dari dua kepentingan tersebut tentu kemudahan yang diberikan hendaklah memberikan hasil yang terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perusahaan rokok dapat memanfaatkan kemudahan penundaan pembayaran cukai untuk menyelesaikan pembayaran cukainya. Penundaan pembayaran cukai diberikan kepada perusahaan rokok yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan terutama neraca dan laporan laba ruginya menunjukkan kondisi yang baik.

Pemerintah sebagai pihak yang memberikan penundaan pembayaran cukai merupakan kreditor yang tentu ingin dibayar tepat waktu. Bila penundaan tersebut tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, maka perusahaan rokok wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari

nilai cukai yang terutang. Karenanya perusahaan rokok yang mendapatkan penundaan tersebut diharuskan melunasi kewajibannya paling lama sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tersebut, dalam hal ini pemerintah memberikan keputusan mengenai nilai cukai yang dapat diberikan penangguhan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan rokok.

PT. Gudang Garam Tbk dan PT. British American Tobacco Indonesia Tbk sebagai suatu perseroan yang bergerak dibidang industri rokok dan merupakan perusahaan go public yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kedua perusahaan tersebut dalam setiap pemesanan pita cukai dilakukan secara kredit yaitu menggunakan kemudahan penundaan pembayaran cukai. Pemberian penundaan pembayaran cukai oleh pemerintah tentu memberi kemudahan bagi perusahaan dalam pelunasan cukainya, namun agar berjalan efektif pemerintah menghitung besaran nilai cukai yang dapat diberikan penangguhan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul :

“ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK UNTUK PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI. ”

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas arah dan pembahasan yang lebih baik sehingga tujuan penelitian dapat dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah

penelitian yaitu mengenai besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan kepada perusahaan rokok dengan melihat kinerja keuangannya. Pembatasan masalah pada penulisan ini adalah dari pemesanan pita cukai (Ck-1) periode 2008 dan 2009 serta laporan keuangan perusahaan rokok periode 2007 dan 2008.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan kinerja keuangan perusahaan rokok untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai
2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan rokok
3. Seberapa besar nilai cukai yang dapat diberikan penundaan

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan kinerja keuangan perusahaan rokok untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan rokok.
3. Untuk mengetahui seberapa besar nilai cukai yang dapat diberikan penundaan.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

- a. Agar besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan pembayaran memperhatikan kinerja keuangan perusahaan rokok secara rinci.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan cukai.

2. Bagi Perusahaan

- a. Agar perusahaan dalam mengajukan nilai cukai yang akan dimintakan penundaan pembayarannya menyiapkan kinerja keuangan yang baik.
- b. Agar perusahaan melakukan berbagai alternatif untuk memperbaiki kinerja keuangannya guna mendapatkan penundaan pembayaran cukai.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang penundaan pembayaran cukai dan kinerja keuangan perusahaan rokok.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajer keuangan sebagai pihak yang melakukan kegiatan keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangannya, tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Manajemen keuangan menurut Sutrisno (2005:3) adalah sebagai berikut :

Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Usaha mendapatkan dana sering disebut pembelanjaan pasif, dan bila kita lihat di neraca akan terlihat di sisi pasiva, sedangkan usaha mengalokasikan dana disebut pembelanjaan aktif dan di neraca akan terlihat di sisi aktiva.

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2005:3) :

Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin

sesuai dengan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aktiva yang dibuat oleh perusahaan.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan menurut Horne dan Wachowicz (2005:3) adalah:

- Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah hal yang paling penting ketika perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal tersebut dimulai dengan penetapan jumlah total aktiva yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Manajer keuangan perlu menetapkan jumlah uang yang harus muncul di atas dua garis bawah pada sisi kiri neraca (aktiva) yaitu ukuran perusahaan. Bahkan ketika jumlah tersebut telah diketahui, komposisi dari aktiva masih harus diputuskan pula. Aktiva yang tidak dapat lagi dijustifikasi secara ekonomis mungkin harus dikurangi, ditiadakan, atau diganti.

- Keputusan Pendanaan

Keputusan penting kedua dalam perusahaan berkaitan dengan keputusan pendanaan. Dalam keputusan pendanaan, manajer berhubungan dengan perbaikan sisi kanan neraca yaitu kewajiban dan ekuitas.

Kebijakan dividen perusahaan juga harus dipandang sebagai bagian integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menetapkan jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah laba saat ini yang ditahan dalam perusahaan berarti semakin sedikit uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Nilai dari dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham karenanya harus

diseimbangkan dengan biaya kesempatan/biaya peluang laba ditahan yang tidak dibagikan sebagai cara untuk pendanaan melalui ekuitas.

Begitu bauran pendanaan telah ditetapkan, manajer keuangan masih harus menetapkan cara terbaik untuk secara fisik mendapatkan dana. Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, cara memasuki kesepakatan sewa jangka panjang, atau negosiasi untuk penjualan obligasi atau saham, haruslah dipahami oleh manajer keuangan.

- **Keputusan Manajemen Aktiva**

Keputusan penting ketiga bagi perusahaan adalah keputusan mengenai manajemen aktiva. Ketika aktiva telah diperoleh dan pendanaan yang tepat telah tersedia, aktiva ini masih harus dikelola secara efisien. Manajer keuangan dibebani berbagai tanggung jawab operasional atas berbagai aktiva yang ada. Tanggung jawab ini membuat manajer keuangan menjadi lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar daripada aktiva tetap. Sejumlah besar tanggung jawab atas manajemen aktiva tetap berada di tangan manajer operasional yang menggunakan berbagai aktiva ini.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Setiap perusahaan haruslah mempunyai laporan keuangan yang baik karena adanya laporan keuangan, maka dapat diketahui apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang mengalami kemajuan dan dapat dipercaya untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan

untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Laporan keuangan menurut Myer (Munawir 2002:14) adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan atau laba ditahan.

Menurut IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, pelaporan pembahasan ekuitas, laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Dari pengertian-pengertian diatas laporan keuangan dalam penerapannya selain terdiri dari neraca dan laporan laba rugi juga sering dilengkapi dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Keseluruhan tentu saja memberikan informasi yang lebih jelas tentang hasil usaha, posisi keuangan dan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan tersebut.

Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan

investasi, memberikan kredit, dan keputusan lain yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Laporan keuangan harus memberikan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan.
3. Laporan keuangan harus memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode.
4. Fokus utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan.
5. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakainya dalam mengevaluasi likuiditas, solvabilitas dan aliran dana perusahaan.
6. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi kepentingan pemilik perusahaan.

2. Komponen Laporan Keuangan

Berikut ini komponen-komponen yang disajikan dalam laporan keuangan:

a. Neraca

Laporan yang sistematis tentang aktiva, kewajiban serta ekuitas dari suatu perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku ditutup dan ditentukan pada suatu akhir tahun fiskal. Neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

1) Aktiva

Aktiva dibagi menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Unsur-unsur didalam aktiva lancar terdiri dari :

- a) Kas.
- b) Investasi jangka pendek.
- c) Piutang.
- d) Persediaan.
- e) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima.

Unsur-unsur didalam aktiva tidak lancar terdiri dari :

- a) Investasi jangka panjang.
- b) Aktiva tetap.
- c) Aktiva tetap tidak berwujud.
- d) Aktiva lain-lain.

2) Kewajiban

Kewajiban atau hutang perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Utang lancar.
- b) Utang jangka panjang.

3) Ekuitas

Ekuitas atau modal yang merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham yang terdiri dari :

- a) Modal saham.

b) Modal disetor tambahan.

c) Laba ditahan.

b. Laporan Rugi Laba

Laporan rugi laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh selama periode tertentu.

c. Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Arus Kas.

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Analisa Laporan Keuangan

Pengertian analisa laporan keuangan menurut Sofyan (2004:192) adalah :

Analisa laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisa laporan keuangan adalah analisa terhadap laporan keuangan yang dapat memaksimalkan informasi yang masih relatif sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat sehingga berguna untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat serta dapat memprediksi keadaan dimasa yang akan datang.

C. Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio Keuangan

Suatu rasio menyatakan perbandingan antara suatu bilangan dan bilangan lain yang dalam hal ini berupa data dari neraca dan laporan rugi laba perusahaan.

Rasio keuangan menghubungkan dua data keuangan dengan membagi suatu bilangan dengan bilangan lain untuk mengetahui kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Rasio keuangan adalah *"angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan"* (Sofyan 2004:205).

Horne dan Wachowicz (2005:202) mengatakan bahwa :

Rasio keuangan adalah sebuah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah suatu angka yang merupakan perbandingan antara pos akuntansi yang saling berhubungan. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keuangan dari perusahaan misalnya mengenai likuiditas perusahaan, kemampuan manajemen memperoleh laba dari penggunaan aktiva perusahaan dan kemampuan manajemen mendanai investasinya, serta hasil yang dapat diperoleh para pemegang saham dari investasi yang dilakukannya ke dalam perusahaan.

2. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Sutrisno (2005) kinerja perusahaan secara sederhana bisa diketahui dari tiga aspek, yaitu:

a. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada perusahaan, artinya semakin tinggi likuiditas semakin percaya para kreditor jangka pendek. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau aktiva yang mudah dijadikan uang tunai, seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan.

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya likuiditas yang baik, namun bagi perusahaan non keuangan yang mempunyai likuiditas kurang dari 2 dianggap kurang baik.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Apabila semua kekayaan perusahaan mampu menutup semua hutang-hutangnya berarti perusahaan dalam kondisi solvabel, sebaliknya apabila pada saat dilikuidasi kekayaan perusahaan tidak bisa menutup semua hutangnya berarti perusahaan dalam kondisi insolvel.

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}}$$

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Semua modal yang bekerja di dalam perusahaan adalah modal sendiri dan modal asing.

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Rasio-rasio keuangan yang penulis gunakan untuk membatasi masalah yang berkaitan dengan metode analisis ini, adalah :

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Dua rasio likuiditas yang digunakan adalah:

a. *Current Ratio*

Current ratio (rasio lancar) mengukur sampai seberapa jauh aset lancar (aktiva lancar) perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Aset lancar mempunyai potensi penggunaan setahun ke depan dari tanggal neraca. Utang lancar akan memerlukan pembayaran maksimum setahun ke depan dari tanggal neraca juga.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Semakin tinggi rasio ini akan semakin aman bagi kreditor. Walaupun tidak ada tolak ukur yang pasti tentang beberapa rasio lancar

minimal yang harus dimiliki suatu perusahaan, umumnya angka dua banding satu (2:1) atau harta lancar dua kali lipat kewajiban jangka pendeknya dianggap cukup aman bagi perusahaan.

b. *Quick Ratio*

Quick ratio (rasio cepat) menghilangkan unsur persediaan dalam aktiva lancar. Rasio cepat dihitung dengan membandingkan kas dengan harta cepat disatu pihak dengan hutang jangka pendek dilain pihak. Harta cepat ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisasikan menjadi uang dalam waktu relatif pendek, persediaan tidak ikut diperhitungkan karena dipandang memerlukan waktu relatif lama untuk menjadi uang tunai, dan tidak ada kepastian apakah persediaan bisa terjual atau tidak.

Apabila persediaan tidak ikut dihitung, maka dengan sendirinya pos di bawah persediaan juga tidak ikut dihitung misalnya :

- Uang muka, biaya di muka
- Pos aktiva lancar lainnya

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Demi keamanan perusahaan, banyak yang berpendapat bahwa sebaiknya rasio lancar ditargetkan minimal dua banding satu (2:1) dan rasio cair satu dibanding satu (1:1). Standar untuk rasio cair tersebut (1:1) mengandung arti bahwa perusahaan boleh merasa aman jika

memiliki harta lancar di luar persediaan dan pembayaran di muka, minimal sebesar kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Solvabilitas

Penggunaan utang jangka pendek akan mempengaruhi likuiditas. Penggunaan utang jangka panjang akan mempengaruhi solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Dua rasio solvabilitas yang digunakan adalah:

a. *Asset to Total Debt Ratio*

Asset to total debt ratio (rasio aktiva terhadap total utang) merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang. Untuk menutup semua hutangnya, maka perusahaan menjamin dengan semua kekayaannya (aktiva).

$$\text{Asset to total debt ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}}$$

b. *Total Debt to Equity Ratio*

Total debt to equity ratio (rasio total utang terhadap modal) adalah membandingkan utang dengan *equity* saja. Rasio ini menunjukkan sejauh mana *equity* menjamin seluruh hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin buruk kondisi solvabilitasnya.

$$\text{Total debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

3. Rasio Profitabilitas

Rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang termasuk dalam rasio profitabilitas diantaranya adalah:

a. *Profit Margin Ratio*

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

b. *Return On Equity (ROE)*

Rasio laba bersih terhadap ekuitas, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

3. Keunggulan Analisa Rasio

Menurut Sofyan (2004:298), analisa rasio memiliki keunggulan dibanding teknik analisa lainnya. Keunggulan tersebut adalah:

- a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

- b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
- c. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain.
- d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score).
- e. Menstandarisir *size* perusahaan.
- f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*.
- g. Lebih mudah melihat *trend* perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

4. Keterbatasan Analisa Rasio

Menurut Sofyan (2004:299) teknik analisa rasio merupakan sebagian dari konsep analisa laporan keuangan. Teknik analisa rasio memiliki kelemahan sebagai berikut :

- a. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya.
- b. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini.
- c. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio.
- d. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron.
- e. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan.

D. Penundaan Pembayaran Cukai

1. Pengertian Penundaan Pembayaran Cukai

Pada dasarnya penundaan pembayaran cukai adalah penangguhan pembayaran cukai yang diberikan kepada perusahaan rokok, yaitu pita cukai diberikan kepada perusahaan kemudian dilekatkan pada kemasan rokok untuk dijual diperedaran bebas dengan mendapat penangguhan pembayaran cukai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam melakukan pembayaran.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai pasal 7A ayat 2a disebutkan bahwa penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Bila pengusaha pabrik tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan maka berdasarkan pasal 7A ayat 8 selain wajib membayar cukai yang terutang, pengusaha pabrik juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.

Pengertian penundaan sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai pasal 7A adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

2. Ketentuan Penundaan Pembayaran Cukai

Ketentuan yang berlaku saat ini mengenai penundaan adalah:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 tentang tata cara penundaan pembayaran cukai.

2.1. Pemberian Penundaan dan Jangka Waktu Penundaan

Pemberian penundaan dan jangka waktu penundaan berdasarkan PMK No. 69/PMK.04/2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

- a. penundaan dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai;
- b. penundaan diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk pengusaha pabrik; atau 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai, untuk importir.

2.2. Perhitungan Besarnya Nilai Cukai untuk Penundaan

Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan berdasarkan PMK No. 69/PMK.04/2009 pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

- a. untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari

pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

- b. untuk importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.

2.3. Jaminan untuk Penundaan

Untuk pemesanan pita cukai dengan mendapatkan penundaan, berdasarkan PMK No. 69/PMK.04/2009 pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan; atau
- b. importir wajib menyerahkan jaminan bank.

Dalam P-26/BC/2009 pasal 1 menjelaskan pengertian dari jaminan-jaminan tersebut:

- a. Jaminan bank adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mewajibkan pihak bank membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

- b. Jaminan dari perusahaan asuransi adalah sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh *surety* yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada *obligee* dalam hal *principal* gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai.
- c. Jaminan perusahaan adalah surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh utang cukainya dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaannya.

2.4. Persyaratan untuk Mendapatkan Penundaan dengan Jaminan

Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan, berdasarkan PMK No. 69/PMK.04/2009 pasal 5 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jaminan perusahaan, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan:
 - Merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik;
 - Merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - Tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;

- Tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan;
 - Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - Memiliki kinerja keuangan yang baik.
- b. jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, pengusaha pabrik harus memenuhi persyaratan:
- Merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - Tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - Tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - Dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari total tagihan;
 - Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - Memiliki kinerja keuangan yang baik.
- c. jaminan bank, importir harus memenuhi persyaratan:
- Merupakan Pengusaha Kena Pajak;

- Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- Tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
- Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- Memiliki kinerja keuangan yang baik.

2.5. Pertimbangan Kinerja Keuangan yang Baik

Penelitian pemenuhan persyaratan jaminan berdasarkan P-26/BC/2009 pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik berupa:

- Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya;
- Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang; dan
- Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal.

Untuk menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir:

- Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);

- Solvabilitas lebih besar dari 1 (satu); dan
- Rentabilitas bernilai positif

Untuk menyetujui jaminan dari perusahaan asuransi yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
- Solvabilitas lebih besar dari 1 (satu); dan
- Rentabilitas bernilai positif

Untuk menyetujui jaminan bank yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
- Solvabilitas dapat lebih kecil atau sama dengan 1 (satu); dan
- Rentabilitas dapat bernilai negatif.

2.6. Penambahan Nilai Cukai Penundaan

Penambahan nilai cukai berdasarkan P-26/BC/2009 pasal 13 dapat diberikan dengan besaran tertentu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 10% (sepuluh persen):
 - Likuiditas lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 1,2 (satu koma dua); dan
 - Rentabilitas positif.
- 20% (duapuluh persen):
 - Likuiditas lebih besar dari 1,2 (satu koma dua) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga); dan

- Rentabilitas positif.
- 30% (tigapuluh persen):
 - Likuiditas lebih besar dari 1,3 (satu koma tiga) sampai dengan 1,4 (satu koma empat); dan
 - Rentabilitas positif.
- 40% (empatpuluh persen):
 - Likuiditas lebih besar dari 1,4 (satu koma empat) sampai dengan 1,5 (satu koma lima); dan
 - Rentabilitas positif.
- 50% (limapuluh persen):
 - Likuiditas lebih besar dari 1,5 (satu koma lima); dan
 - Rentabilitas positif.

2.7. Masa Berlaku Pemberian Penundaan

Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai berdasarkan PMK No. 69/PMK.04/2009 pasal 8 ayat 5 berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian pada PT. Gudang Garam Tbk dan PT. British American Tobacco Indonesia Tbk. Data-data laporan keuangan, pemesanan pita cukai (Ck-1) maupun data lain yang berkaitan dengan perusahaan penulis dapat dari Direktorat Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusat Referensi Bursa Efek Indonesia.

2. Sejarah singkat perusahaan

a. PT. Gudang Garam Tbk

Perseroan yang semula bernama PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Kediri (PT. Gudang Garam), didirikan dengan akte Suroso SH, wakil notaris sementara di Kediri, tanggal 30 Juni 1971 No. 10, diubah dengan akte notaris yang sama tanggal 13 Oktober 1971 No. 13. Akte-akte ini disetujui oleh menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/197/7 tanggal 17 November 1971, didaftarkan di pengadilan negeri Kediri dengan No. 31/1971 dan No. 32/1971 tanggal 26 November 1971, dan diumumkan dalam tambahan No. 586 pada berita Negara No. 104 tanggal 28 Desember 1971.

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang

No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dengan akte Wachid hasyim SH, notaris di Surabaya, tanggal 19 Juni 1997 No. 58, yang antara lain merubah nama perseroan menjadi PT. Perusahaan rokok tjap Gudang Garam Tbk (disingkat PT. Gudang Garam Tbk).

Akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2.1873 HT.01.04.Th 98 tanggal 19 Maret 1998, didaftarkan dengan No. TDP 13111300014 pada kantor pendaftaran perusahaan Kotamadya Kediri, agenda No. 4426 pada Berita Negara No. 62 tanggal 4 Agustus 1998.

Sesuai dengan anggaran dasarnya, perseroan bergerak dibidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok. Perseroan merupakan kelanjutan dari perusahaan perorangan yang didirikan tahun 1958. Pada tahun 1969 berubah status menjadi Firma dan pada tahun 1971 menjadi perseroan terbatas, operasi komersial dimulai tahun 1958.

Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor pusat di Jl. Semampir II/T, Kediri, Jawa Timur, kantor perwakilan Jakarta di Jl. Jenderal A. Yani 79, dan kantor perwakilan Surabaya di Jl. Pengenal 7-15, Surabaya, Jawa Timur.

PT. Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok penyumbang cukai terbesar bagi negara. Produk hasil tembakau yang dihasilkan adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Klobot (KLB). SKM merupakan produk yang paling banyak dihasilkan setelah itu SKT, sementara KLB tidak terlalu banyak.

b. PT. British American Tobacco Indonesia Tbk

Tahun 1917 berdiri dengan nama Indo Egyptian Cigarette, namun pada tahun 1923 berubah menjadi British American Tobacco London. British American Tobacco menjadi suatu industri pada tahun 1929 yang membuktikan bahwa BAT telah berkembang dengan pesat dan mulai melibatkan dua anak perusahaan yaitu Java Leaf Tobacco dan British American Tobacco Indonesia. BAT melakukan penggabungan usaha dengan tiga anak perusahaan di Indonesia menjadi perusahaan tunggal pada tahun 1955-1958.

PT. BAT Indonesia merupakan perusahaan rokok dan tembakau internasional. Produk hasil tembakau yang dihasilkan adalah Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Tembakau Iris (TIS). SPM merupakan produk unggulan yang paling banyak dihasilkan, sementara TIS relatif sedikit.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Deskriptif Kuantitatif artinya penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai penundaan pembayaran cukai yang dapat diberikan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan rokok. Metode penelitian Deskriptif ialah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek penelitian, kemudian objek penelitian tersebut diolah dan dianalisis.

C. Sampel Penelitian

Sampel yang dilakukan pada penelitian ini, hanya terbatas pada 2 (dua) perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan yaitu dari tahun 2007 dan 2008 serta dokumen pemesanan pita cukai (Ck-1) periode 2008 dan 2009. Perusahaan sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PT. Gudang Garam Tbk
2. PT. British American Tobacco Indonesia Tbk

D. Variabel dan Skala Pengukuran

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan mengubah menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Caranya adalah dengan memilih dimensi tertentu konsep yang mempunyai variasi nilai. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel kinerja keuangan dan variabel penundaan pembayaran cukai.

Skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan, teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan. Yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

- *Current ratio* (rasio lancar)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- *Quick Ratio* (rasio cepat)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas

- *Asset to total debt ratio* (rasio aktiva terhadap total utang)

$$\text{Asset to total debt ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}}$$

- *Total debt to equity ratio* (rasio total utang terhadap modal)

$$\text{Total debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

3. Rasio Profitabilitas

- *Profit Margin Ratio*

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

- *Return On Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

2. Besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan berdasarkan PMK. No. 69/PMK.04/2009 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

- a. untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.

Contoh perhitungan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan

Daftar pemesanan pita cukai dalam 6 (enam) bulan terakhir:

No	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)		
		SKM	SKT	Jumlah
1	Pebruari	214.500.000,00	79.920.000,00	294.420.000,00
2	Maret	534.900.000,00	152.820.000,00	687.720.000,00
3	April	218.700.000,00	75.600.000,00	294.300.000,00
4	Mei	187.200.000,00	71.280.000,00	258.480.000,00
5	Juni	624.000.000,00	71.280.000,00	695.280.000,00
6	Juli	468.000.000,00	118.320.000,00	586.320.000,00
Jumlah 3 bulan		1.279.200.000,00	260.880.000,00	1.540.080.000,00
Jumlah 6 bulan		2.247.300.000,00	569.220.000,00	2.816.520.000,00

Pesanan pita cukai rata-rata per bulan:

- dalam 6 (enam) bulan terakhir

SKM sebesar $\text{Rp}2.247.300.000,00/6=\text{Rp}374.550.000,00$

SKT sebesar $\text{Rp } 569.220.000,00/6=\text{Rp } 94.870.000,00$

- dalam 3 (tiga) bulan terakhir

SKM sebesar $\text{Rp}1.279.200.000,00/3=\text{Rp}426.400.000,00$

SKT sebesar $\text{Rp } 260.880.000,00/3=\text{Rp } 86.960.000,00$

Nilai cukai yang dimintakan penundaan:

SKM sebesar : $2 \times \text{Rp}426.400.000,00 =\text{Rp } 852.800.000,00$

SKT sebesar : $2 \times \text{Rp } 94.870.000,00 =\text{Rp } 189.740.000,00$

$\text{Rp}1.042.540.000,00$

Tambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan (memenuhi syarat 50%)

SKM sebesar : $50\% \times \text{Rp}852.800.000,00 =\text{Rp } 426.400.000,00$

SKT sebesar : $50\% \times \text{Rp}189.740.000,00 =\text{Rp } 94.870.000,00$

$\text{Rp } 521.270.000,00$

Total nilai cukai yang dimintakan penundaan $\text{Rp. } 1.563.810.000,00$

E. Metode Pengumpulan Data

Studi Keperpustakaan, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dengan mengunjungi Direktorat Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan data pemesanan pita cukai (Ck-1), serta mengunjungi Pusat Referensi Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan rokok. Penulis juga mengunjungi

perpustakaan Universitas Mercu Buana dan perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kuantitatif yang artinya menganalisa data dengan berdasarkan angka-angka, untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan rokok guna menghitung nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang diolah dari laporan keuangan perusahaan rokok periode 2007 dan 2008 serta pemesanan pita cukai (Ck-1) periode 2008 dan 2009.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Kinerja Keuangan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Penundaan pembayaran cukai merupakan kemudahan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan rokok dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Pemberian penundaan ini tentu sangat membantu perusahaan rokok, namun kemudahan tersebut tentu harus sejalan dengan tujuan pengenaan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai, yaitu:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

Untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 tentang tata cara penundaan pembayaran cukai, perusahaan rokok wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan. Penelitian pemenuhan persyaratan jaminan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik berupa:

1. Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya (rasio lancar);
2. Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang (*Asset to total debt ratio*); dan
3. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal (*return on equity*).

Batasan kinerja keuangan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai tergantung pada jenis jaminan yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik / perusahaan rokok, yaitu:

1. Jaminan perusahaan, apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir:
 - a. Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
 - b. Solvabilitas lebih besar dari 1 (satu); dan
 - c. Rentabilitas bernilai positif.
2. Jaminan dari perusahaan asuransi, apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir:
 - a. Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
 - b. Solvabilitas lebih besar dari 1 (satu); dan
 - c. Rentabilitas bernilai positif.
3. Jaminan bank, apabila dalam 1 (satu) tahun terakhir:
 - a. Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
 - b. Solvabilitas dapat lebih kecil atau sama dengan 1 (satu); dan
 - c. Rentabilitas dapat bernilai negatif.

Besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan untuk pengusaha pabrik / perusahaan rokok sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun

waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Nilai cukai tersebut dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan. Syarat untuk mendapatkan penambahan penundaan nilai cukai tersebut sebagai berikut:

1. Penambahan nilai cukai dapat diberikan 10% (sepuluh persen) apabila:
 - Likuiditas lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 1,2 (satu koma dua); dan
 - Rentabilitas positif.
2. Penambahan nilai cukai dapat diberikan 20% (sepuluh persen) apabila:
 - Likuiditas lebih besar dari 1,2 (satu koma dua) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - Rentabilitas positif.
3. Penambahan nilai cukai dapat diberikan 30% (sepuluh persen) apabila:
 - Likuiditas lebih besar dari 1,3 (satu koma tiga) sampai dengan 1,4 (satu koma empat); dan
 - Rentabilitas positif.
4. Penambahan nilai cukai dapat diberikan 40% (sepuluh persen) apabila:
 - Likuiditas lebih besar dari 1,4 (satu koma empat) sampai dengan 1,5 (satu koma lima); dan
 - Rentabilitas positif.
5. Penambahan nilai cukai dapat diberikan 50% (sepuluh persen) apabila:
 - Likuiditas lebih besar dari 1,5 (satu koma lima); dan
 - Rentabilitas positif.

B. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok Dalam Berbagai Ukuran

Penilaian Rasio

Untuk mengetahui posisi dan perkembangan keuangan suatu perusahaan, analisis rasio merupakan salah satu alat analisis yang paling banyak dipergunakan. Angka rasio menggambarkan hubungan antara pos yang ada di neraca dan laporan laba rugi. Dengan menggunakan alat analisis berupa angka rasio, akan dapat menjelaskan dan memberi gambaran kepada Analis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Adapun perhitungan angka rasio dari PT. Gudang Garam Tbk dan PT. British American Tobacco Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan seperti neraca akhir tahun dalam 2 (dua) periode terakhir serta laporan laba rugi sebagai berikut :

1. PT. Gudang Garam Tbk

a. Rasio Likuiditas

- **Rasio Lancar**

Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva lancar dapat menjamin hutang lancar pada suatu periode tertentu, Semakin tinggi rasio ini akan semakin aman bagi kreditor.

Tabel 4.1
Rasio Lancar PT. Gudang Garam Tbk
Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Aktiva Lancar (a)	Hutang Lancar (b)	Rasio Lancar (a:b)
2007	17.124.562	8.775.317	1,95
2008	17.008.576	7.670.532	2,28

Sumber : Data diolah (2009)

Berdasarkan data dari tabel 4.1 diatas terlihat jumlah aktiva lancar dapat menjamin kewajiban lancar. Pada tahun 2007 rasio lancar yang dihasilkan sebesar 1,95 kali dan pada tahun 2008 sebesar 2,28 kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 1,95 aktiva lancar perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 2,28 aktiva lancar perusahaan.

- Rasio Cepat

Apabila rasio lancar menghitung seluruh aktiva lancar, maka rasio cepat menghilangkan unsur persediaan dalam aktiva lancar. Apabila persediaan tidak ikut dihitung, maka dengan sendirinya pos di bawah persediaan juga tidak ikut dihitung. Persediaan tidak ikut diperhitungkan karena dipandang memerlukan waktu relatif lama untuk menjadi uang tunai, dan tidak ada kepastian apakah persediaan bisa terjual atau tidak.

Tabel 4.2
Rasio Cepat PT. Gudang Garam Tbk
Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Quick Asset (a)	Hutang Lancar (b)	Rasio Cepat (a:b)
2007	3.125.860	8.775.317	0,36
2008	3.233.424	7.670.532	0,42

Sumber : Data diolah (2009)

Hasil perhitungan rasio ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 0,36 aktiva cepat perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 0,42 aktiva cepat perusahaan.. Dari hasil rasio ini terlihat bahwa nilai persediaan begitu dominan di komposisi aktiva lancar, dengan menghilangkan unsur persediaan nilai rasio cepat menjadi jauh berbeda dengan rasio lancar bahkan nilai rasio cepat dibawah angka 1 (satu).

b. Rasio Solvabilitas

- *Asset to Total Debt Ratio*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup semua hutangnya dengan semua kekayaannya (aktiva).

Tabel 4.3
Asset to Total Debt Ratio PT. Gudang Garam Tbk
 Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Aktiva (a)	Total Hutang (b)	<i>Asset to Total Debt Ratio (a:b)</i>
2007	23.779.951	9.640.418	2,47
2008	24.072.959	8.553.688	2,81

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini didapat bahwa setiap tahunnya total aktiva lebih besar dari kewajiban. Pada tahun 2007 setiap Rp 1 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 2,47 kekayaan yang dimiliki perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 2,81 kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dari rasio ini menunjukkan adanya peningkatan, dengan demikian perusahaan ini masih dalam kondisi yang baik, sebab hutang-hutangnya masih tertutup oleh kekayaannya atau dalam kondisi solvabel.

- *Total debt to equity ratio*

Rasio ini merupakan imbang antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.

Tabel 4.4
Total debt to equity ratio PT. Gudang Garam Tbk
 Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Hutang (a)	Modal (b)	<i>Total Debt to Equity Ratio (a:b)</i>
2007	9.640.418	14.119.796	0,68
2008	8.553.688	15.519.266	0,55

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini didapat bahwa setiap tahunnya total hutang lebih kecil dari ekuitasnya. Pada tahun 2007 setiap Rp 0,68 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1 modal yang dimiliki perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 0,55 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1 modal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut berarti perusahaan dapat membayar hutangnya dari modal yang dimiliki.

c. Rasio Profitabilitas

- *Profit Margin Ratio*

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

Tabel 4.5
Profit Margin Ratio PT. Gudang Garam Tbk
 Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bersih (a)	Penjualan Bersih (b)	<i>Profit Margin</i> <i>Ratio</i> {(a:b)x100%}
2007	1.443.585	27.389.365	5,27%
2008	1.880.492	30.251.643	6,27%

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini diketahui bahwa profit margin mengalami kenaikan dari tahun 2007 ke 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih dan penjualan. Pada tahun 2007 dari 100% penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 5,27% dan pada tahun 2008 dari 100% penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 6,27%.

- *Return On Equity (ROE)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.

Tabel 4.6
Return On Equity PT. Gudang Garam Tbk
 Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bersih (a)	Modal (b)	<i>Return On Equity</i> $\{(a:b) \times 100\%$
2007	1.443.585	14.119.796	10,22%
2008	1.880.492	15.519.266	12,12%

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini diketahui bahwa *return on equity* mengalami kenaikan dari tahun 2007 ke 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih dan modal yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2007 dari 100% modal yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 10,22% dan pada tahun 2008 dari 100% modal yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 12,12%. Keadaan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap modal yang ditanam sudah cukup baik.

2. PT. British American Tobacco Indonesia Tbk

a. Rasio Likuiditas

- Rasio Lancar

Tabel 4.7
Rasio Lancar PT. British American Tobacco Indonesia Tbk
Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Aktiva Lancar (a)	Hutang Lancar (b)	Rasio Lancar (a:b)
2007	500.956	319.265	1,57
2008	368.721	253.129	1,46

Sumber : Data diolah (2009)

Berdasarkan perhitungan rasio ini diketahui terjadi penurunan nilai rasio lancar. Pada tahun 2007 rasio lancar yang dihasilkan sebesar 1,57 kali dan pada tahun 2008 sebesar 1,46 kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 1,57 aktiva lancar perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 1,46 aktiva lancar perusahaan.

- Rasio Cepat

Tabel 4.8
Rasio Cepat PT. British American Tobacco Indonesia Tbk
Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Quick Asset (a)	Hutang Lancar (b)	Rasio Cepat (a:b)
2007	254.657	319.265	0,80
2008	211.874	253.129	0,84

Sumber : Data diolah (2009)

Hasil perhitungan rasio ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 0,8 aktiva cepat perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1 hutang lancar perusahaan dijamin dengan Rp 0,84 aktiva cepat perusahaan.. Dari hasil rasio ini terlihat bahwa nilai persediaan begitu dominan di komposisi aktiva lancar, dengan menghilangkan unsur persediaan nilai rasio cepat menjadi jauh berbeda dengan rasio lancar bahkan nilai rasio cepat dibawah angka 1 (satu).

b. Rasio Solvabilitas

- *Asset to Total Debt Ratio*

Tabel 4.9
Asset to Total Debt Ratio PT. British American Tobacco Indonesia Tbk
Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Aktiva (a)	Total Hutang (b)	<i>Asset to Total Debt Ratio (a:b)</i>
2007	675.726	339.566	1,99
2008	527.747	278.208	1,90

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini didapat bahwa setiap tahunnya total aktiva lebih besar dari kewajiban. Pada tahun 2007 setiap Rp 1 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1,99 kekayaan yang dimiliki perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1,90 kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dari rasio ini menunjukkan adanya sedikit penurunan, namun demikian perusahaan ini masih dalam kondisi yang baik, sebab hutang-

hutangnya masih tertutup oleh kekayaannya atau dalam kondisi solvabel.

- *Total Debt to Equity Ratio*

Tabel 4.10
Total debt to equity ratio PT. British American Tobacco Indonesia Tbk
Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Hutang (a)	Modal (b)	<i>Total Debt to Equity Ratio (a:b)</i>
2007	339.566	336.160	1,01
2008	278.208	249.539	1,11

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini didapat bahwa setiap tahunnya total hutang lebih besar dari ekuitasnya. Pada tahun 2007 setiap Rp 1,01 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1 modal yang dimiliki perusahaan dan pada tahun 2008 setiap Rp 1,11 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1 modal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut berarti perusahaan tidak dapat membayar hutangnya dari modal yang dimiliki.

c. Rasio Profitabilitas

- *Profit Margin Ratio*

Tabel 4.11
Profit Margin Ratio PT. British American Tobacco Indonesia Tbk
 Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bersih (a)	Penjualan Bersih (b)	<i>Profit Margin Ratio</i> $\{(a:b) \times 100\%\}$
2007	(34.218)	672.705	- 5,09%
2008	(86.621)	507.180	- 17,08%

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini diketahui bahwa profit margin bernilai negatif, disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian selama tahun 2007 dan 2008. Kerugian tersebut disebabkan oleh jumlah beban usaha lebih besar dari laba kotor yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan perusahaan tidak efisien dalam mengelola beban usahanya sehingga mengakibatkan kerugian.

- *Return On Equity (ROE)*

Tabel 4.12
Return On Equity PT. British American Tobacco Indonesia Tbk
 Tahun 2007 – 2008

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bersih (a)	Modal (b)	<i>Return On Equity</i> $\{(a:b) \times 100\%\}$
2007	(34.218)	336.160	- 10,18%
2008	(86.621)	249.539	- 34,71%

Sumber : Data diolah (2009)

Dari hasil perhitungan rasio ini diketahui bahwa *return on equity* bernilai negatif, disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian

selama tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2007 dari 100% modal yang dimiliki perusahaan mengalami kerugian sebesar 10,18% dan pada tahun 2008 dari 100% modal yang dimiliki perusahaan mengalami kerugian sebesar 34,71%.

Dari hasil analisis rasio tersebut penelitian dapat disajikan hasilnya seperti pada table 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Analisis Rasio Keuangan
atas Neraca dan Laporan Rugi/Laba

No	Hasil Analisis Rasio	PT. Gudang Garam		PT. BAT Indonesia	
		2007	2008	2007	2008
1	Likuiditas				
a	Rasio Lancar	1,95 kali	2,28 kali	1,57 kali	1,46 kali
b	Rasio Cepat	0.36 kali	0,42 kali	0,80 kali	0,84 kali
2	Solvabilitas				
a	Asset to Total Debt Ratio	2,47 kali	2,81 kali	1,99 kali	1,90 kali
b	Total Debt to Equity Ratio	0,68 kali	0,55 kali	1,01 kali	1,11 kali
3	Profitabilitas				
a	Profit Margin Ratio	5,27%	6,27%	-5,09%	-17,08%
b	Return On Equity	10,22%	12,12%	-10,18%	-34,71%

C. Nilai Cukai yang Dapat Diberikan Penundaan

Untuk nilai cukai yang dapat diberikan penundaan pada perusahaan rokok menggunakan batasan kinerja keuangan. Apabila kinerja keuangan perusahaan memenuhi batasan yang ditentukan maka nilai cukai yang diberikan penundaan

dapat dihitung berdasarkan data pemesanan pita cukai (Ck-1) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Dari hasil perhitungan kinerja keuangan di atas maka dapat dihitung nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dengan melihat angka rasio keuangan berupa rasio lancar, *Asset to total debt ratio*, dan *return on equity*. Perhitungan nilai cukai tersebut tidak melibatkan rasio cepat, *total debt to equity ratio*, dan *profit margin ratio*.

Rasio cepat menghilangkan unsur persediaan dalam aktiva lancar sehingga hanya memperhitungkan aset yang sudah lebih dekat dengan uang tunai. Nilai persediaan dalam industri rokok selalu besar, hal ini terjadi karena perputaran persediaan sangat lambat karena karakter natural dari tembakau yang memerlukan perlakuan khusus. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan yang cukup besar antara rasio lancar dan rasio cepat dalam perusahaan rokok. Persediaan yang ada belum tentu dapat terjual seluruhnya, bila demikian persediaan tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai ataupun bila akhirnya terjual harganya bisa dibawah nilai buku.

Total debt to equity ratio digunakan untuk melihat imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri, dalam hal ini sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. *Profit margin ratio* dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan dari nilai penjualan bersih.

1. PT. Gudang Garam Tbk

Berdasarkan tabel 4.13 diatas rasio lancar perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebesar 1,95 kali dan 2,28 kali, angka tersebut memenuhi likuiditas yang dipersyaratkan yaitu lebih besar dari 1 (satu). Solvabilitas perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebesar 2,47 kali dan 2,81 kali. Rentabilitas/Profitabilitas perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai positif. Berdasarkan hasil tersebut maka perusahaan dapat mengajukan penundaan dengan menggunakan jaminan perusahaan, jaminan perusahaan asuransi, atau jaminan bank.

Perhitungan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan untuk pengajuan permohonan penundaan bulan Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Daftar pemesanan pita cukai
PT. Gudang Garam Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir

No	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)		
		SKM	SKT	KLB
1	Desember '08	1.197.660.126.600	93.806.654.400	292.440.000
2	Januari '09	1.659.475.995.000	163.761.018.000	327.960.000
3	Pebruari '09	821.182.608.000	76.833.720.000	209.880.000
4	Maret '09	785.956.392.000	111.430.800.000	234.000.000
5	April '09	1.258.734.900.000	142.292.040.000	297.360.000
6	Mei '09	1.358.075.100.000	140.314.320.000	284.760.000
Jumlah 3 bulan		3.402.766.392.000	394.037.160.000	816.120.000
Jumlah 6 bulan		7.081.085.121.600	728.438.552.400	1.646.400.000

Sumber : Data diolah dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2009)

Pesanan pita cukai rata-rata per bulan:

- dalam 6 (enam) bulan terakhir

$$\text{SKM sebesar} \quad \text{Rp } 7.081.085.121.600/6 \quad = \text{Rp } 1.180.180.853.600$$

SKT sebesar Rp 728.438.552.400/6 = Rp 121.406.425.400

KLB sebesar Rp 1.646.400.000/6 = Rp 274.400.000

- dalam 3 (tiga) bulan terakhir

SKM sebesar Rp 3.402.766.392.000/3 = Rp 1.134.255.464.000

SKT sebesar Rp 394.037.160.000/3 = Rp 131.345.720.000

KLB sebesar Rp 816.120.000/3 = Rp 272.040.000

Nilai cukai yang dimintakan penundaan:

SKM sebesar : 2 x Rp 1.180.180.853.600 = Rp 2.360.361.707.200

SKT sebesar : 2 x Rp 131.345.720.000 = Rp 262.691.440.000

KLB sebesar : 2 x Rp 274.400.000 = Rp 548.800.000

Rp 2.623.601.947.200

Untuk tambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan, likuiditas perusahaan 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari 1,5 (satu koma lima) dan rentabilitas perusahaan bernilai positif. Maka perusahaan memenuhi syarat penambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan sebesar 50% (limapuluh persen)

SKM sebesar : 50% x Rp 2.360.361.707.200 = Rp 1.180.180.853.600

SKT sebesar : 50% x Rp 262.691.440.000 = Rp 131.345.720.000

KLB sebesar : 50% x Rp 548.800.000 = Rp 274.400.000

Rp 1.311.800.973.600

Total nilai cukai yang dapat diberikan penundaan Rp 3.935.402.920.800

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa PT. Gudang Garam Tbk dapat mengajukan nilai cukai penundaan sebesar

Rp 3.935.402.920.800. Nilai tersebut merupakan nilai cukai maksimal untuk pemesanan pita cukai secara kredit.

2. PT. British American Tobacco Indonesia Tbk

Berdasarkan tabel 4.13 diatas rasio lancar perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebesar 1,57 kali dan 1,46 kali, angka tersebut memenuhi likuiditas yang dipersyaratkan yaitu lebih besar dari 1 (satu). Solvabilitas perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebesar 1,99 kali dan 1,90 kali. Rentabilitas/Profitabilitas perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka perusahaan dengan batasan kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir hanya dapat mengajukan penundaan dengan menggunakan jaminan bank.

Perhitungan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan untuk pengajuan permohonan penundaan bulan Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Daftar pemesanan pita cukai
PT. BAT Indonesia Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir

No	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)	
		SPM	TIS
1	Desember '08	22.546.182.000	36.590.400
2	Januari '09	54.485.634.000	2.217.600
3	Pebruari '09	59.377.500.000	47.880.000
4	Maret '09	45.249.750.000	44.100.000
5	April '09	58.230.000.000	44.100.000
6	Mei '09	27.954.000.000	50.400.000
Jumlah 3 bulan		131.433.750.000	138.600.000
Jumlah 6 bulan		267.843.066.000	225.288.000

Sumber : Data diolah dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2009)

Pesanan pita cukai rata-rata per bulan:

- dalam 6 (enam) bulan terakhir

SPM sebesar Rp 267.843.066.000/6 = Rp 44.640.511.000

TIS sebesar Rp 225.288.000/6 = Rp 37.548.000

- dalam 3 (tiga) bulan terakhir

SPM sebesar Rp 131.433.750.000/3 = Rp 43.811.250.000

TIS sebesar Rp 138.600.000/3 = Rp 46.200.000

Nilai cukai yang dimintakan penundaan:

SPM sebesar : 2 x Rp 44.640.511.000 = Rp 89.281.022.000

TIS sebesar : 2 x Rp 46.200.000 = Rp 92.400.000

Rp 89.373.422.000

Untuk tambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan, likuiditas perusahaan 1 (satu) tahun terakhir lebih besar dari 1,4 (satu koma empat) sampai dengan 1,5 (satu koma lima), namun rentabilitas perusahaan bernilai negatif. Maka perusahaan tidak memenuhi syarat penambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan.

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa PT. British American Tobacco Indonesia Tbk dapat mengajukan nilai cukai penundaan sebesar Rp 89.373.422.000. Nilai tersebut merupakan nilai cukai maksimal untuk pemesanan pita cukai secara kredit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai pengusaha pabrik / perusahaan rokok wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan. Pemenuhan jaminan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik berupa :
 - Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya;
 - Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang; dan
 - Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal.
2. Batasan kinerja keuangan yang dihitung dari laporan keuangan (LK) untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai tergantung pada jenis jaminan yang akan dipergunakan oleh perusahaan rokok :

Jenis Jaminan	Likuiditas	Solvabilitas	Rentabilitas
Bank; LK 1 tahun terakhir	> 1	Dapat ≤ 1	Dapat negatif
Perusahaan asuransi; LK 1 tahun terakhir	> 1	> 1	Positif
Perusahaan; LK 2 tahun terakhir	> 1	> 1	Positif

Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan untuk pengusaha pabrik / perusahaan rokok sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Nilai cukai tersebut dapat ditambah dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan :

Penambahan Nilai Cukai	10%	20%	30%	40%	50%
Likuiditas	> 1 s/d 1,2	> 1,2 s/d 1,3	> 1,3 s/d 1,4	> 1,4 s/d 1,5	> 1,5
Rentabilitas	+	+	+	+	+

3. Dalam kasus PT. Gudang Garam Tbk dari hasil analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas / profitabilitas dapat disimpulkan bahwa perusahaan cukup baik, terutama untuk pemenuhan persyaratan kinerja keuangan yang baik untuk penundaan pembayaran cukai. Namun bila rasio cepat dipergunakan sebagai syarat kinerja keuangan yang baik, maka akan didapat angka rasio dibawah 1 (satu), hal ini dikarenakan nilai persediaan begitu dominan di komposisi aktiva lancar.
4. Dalam kasus PT. British American Tobacco Indonesia Tbk dari hasil analisis rasio keuangan likuiditas, solvabilitas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan cukup baik. Namun untuk rasio rentabilitas / profitabilitas menghasilkan angka yang negatif, hal ini disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan tetap masuk dalam persyaratan kinerja keuangan yang baik untuk penundaan

pembayaran cukai dengan menggunakan jaminan bank. Bila rasio cepat dipergunakan sebagai syarat kinerja keuangan yang baik, maka akan didapat angka rasio dibawah 1 (satu), hal ini dikarenakan nilai persediaan begitu dominan di komposisi aktiva lancar.

5. PT. Gudang Garam Tbk setelah memenuhi batas kinerja keuangan yang baik dalam perhitungan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan, maka dapat mengajukan nilai cukai penundaan sebesar Rp 3.935.402.920.800. Sementara PT. British American Tobacco Indonesia Tbk dapat mengajukan nilai cukai penundaan sebesar Rp 89.373.422.000. Nilai tersebut merupakan nilai cukai maksimal untuk pemesanan pita cukai secara kredit.

B. Saran

1. Untuk mengajukan nilai cukai yang akan dimintakan penundaan pembayarannya, perusahaan rokok harus menyiapkan kinerja keuangan yang baik. Perusahaan rokok dapat melakukan berbagai alternatif untuk memperbaiki kinerja keuangannya guna mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
2. Berdasarkan sifat atau karakteristik barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 UU No. 39 tahun 2007, maka laporan keuangan yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan penundaan cukai dengan jaminan harus sudah diaudit oleh kuantan publik yang telah teregristrasi oleh IAI dan DJBC, serta penentuan batasan penundaan selain darilaporan keuangan juga menggunakan range agar adil bagi perusahaan kecil.

3. Batasan kinerja keuangan yang baik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 perlu dinaikkan untuk menjamin pelunasan cukai yang diberikan penundaan. Rasio cepat hendaknya juga menjadi ukuran batasan kinerja keuangan yang baik, karena persediaan dipandang memerlukan waktu relatif lama untuk menjadi uang tunai dan tidak ada kepastian apakah persediaan bisa terjual atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, UU No. 39 Tahun 2007.
- Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai*, Permen Keuangan No.69/PMK.04/2009.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai*, Per Dirjen No.26/BC/2009.
- H. Sutrisno. 2005. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, EKONISIA, Yogyakarta.
- H.S. Munawir. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Prihadi Toto. 2008. *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan: 7 Analisis Rasio Keuangan*. PPM, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap. 2004. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Grafindo, Jakarta.
- Van Horne, J.C. & Wachowicz, J.M. Jr. 2005. *Fundamentals of Financial Management*, alih bahasa Dewi Fitriasaki dan Deny Arnos Kwary. Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.